

**PENERAPAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERWAWASAN
MULTIKULTURAL DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SISWA**

**Syahril Rizal S¹, Petrus Irianto², Diki Kurniawan³, Kusdianto⁴, Tanta⁵, Robert
Masreng⁶, Yulius Mataputun⁷**

Universitas Cenderawasih^{1,2,3,4,5,6,7}

e-mail: syahril.nisyafa@gmail.com¹, petrusirianto@fkip.uncen.ac.id²,
dikikurniawan84@gmail.com³, kusdintofkipuncen@gmail.com⁴, tanta@fkip.uncen.ac.id⁵,
masrengrobert@yahoo.com⁶, yuliusmataputun1965@gmail.com⁷

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 17/5/2026

ABSTRAK

Tantangan sosiokultural dan heterogenitas etnis yang kompleks di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan wilayah Papua sering kali memicu munculnya fenomena kekerasan antarsiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural guna mencegah kekerasan di SMKS YPK TIK Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Fokus kajian meliputi pembangunan sikap demokratis, internalisasi paradigma keragaman, penegakan prinsip anti-diskriminasi, serta pengembangan sensitivitas gender. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran desain sekuensial eksplanatori melalui penyebaran angket kepada lima puluh responden siswa dan wawancara sembilan informan kunci. Temuan kuantitatif menunjukkan indikator kepemimpinan multikultural berada pada kategori sedang, dengan skor anti-diskriminasi 66,91%, paradigma keragaman 63,20%, sensitivitas gender 62,80%, serta sikap demokratis 58,60%. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kearifan lokal Papua yakni Tiga Batu Satu Tungku ke dalam sistem manajerial sekolah. Faktor pendukung melibatkan dukungan yayasan, sementara hambatan mencakup pengaruh minuman keras. Dampaknya, kekerasan fisik berhasil ditekan hingga tingkat 62,7%, namun muncul tantangan baru berupa kekerasan digital sebesar 67%. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan multikultural berbasis keadilan restoratif sangat efektif dalam mereduksi agresi fisik secara signifikan, akan tetapi institusi pendidikan memerlukan penguatan strategi literasi digital multikultural yang sistemik untuk menghadapi dinamika kekerasan di era digital yang semakin kompleks demi terciptanya harmonisasi sekolah secara berkesinambungan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Multikultural, Kepala Sekolah, Pencegahan Kekerasan, Tiga Batu Satu Tungku, SMK, Papua.*

ABSTRACT

Complex sociocultural challenges and ethnic heterogeneity in the vocational high school environment in Papua often trigger the emergence of violence between students. This study aims to analyze in depth the implementation of multicultural leadership of the principal to prevent violence at SMKS YPK TIK Serui, Yapen Islands Regency. The focus of the study includes the development of democratic attitudes, internalization of the diversity paradigm, enforcement of anti-discrimination principles, and development of gender sensitivity. The research method used is a mixed method explanatory sequential design through the distribution of questionnaires to fifty student respondents and interviews with nine key informants. Quantitative findings show that multicultural leadership indicators are in the moderate category, with an anti-discrimination score of 66.91%, diversity paradigm 63.20%, gender sensitivity

62.80%, and democratic attitudes 58.60%. The novelty of this study lies in the integration of Papuan local wisdom, namely Three Stones One Furnace, into the school managerial system. Supporting factors include foundation support, while obstacles include the influence of alcohol. As a result, physical violence was successfully reduced by 62.7%, but a new challenge emerged in the form of digital violence, which increased by 67%. The study's conclusions confirm that multicultural leadership based on restorative justice is highly effective in significantly reducing physical aggression. However, educational institutions need to strengthen systemic multicultural digital literacy strategies to address the increasingly complex dynamics of violence in the digital era and to create sustainable school harmony.

Keywords: *Multicultural Leadership, School Principal, Violence Prevention, Tiga Batu Satu Tungku, Vocational School, Papua.*

PENDAHULUAN

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang majemuk secara sosiokultural, etnis, dan religius menempatkan dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam merawat integrasi sosial. Di wilayah Papua, tantangan pendidikan menjadi lebih kompleks seiring dengan dinamika politik, krisis identitas, dan sejarah panjang ketidakadilan struktural yang sering kali bermanifestasi dalam bentuk konflik horizontal maupun vertikal. Realitas empiris menunjukkan bahwa tantangan intoleransi saat ini menjadi ancaman serius bagi integritas pendidikan nasional, di mana terdapat peningkatan jumlah pelajar yang terpapar paham eksklusivitas yang menolak keberagaman. Kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menjembatani perbedaan budaya menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang primordial mereka (Prayitno, 2024).

Papua sebagai wilayah dengan heterogenitas multikultural yang sangat besar memiliki satuan pendidikan yang sering kali menjadi mikrokosmos dari keberagaman tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya yang berfokus pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menghadapi tekanan ganda dalam mengelola tantangan administratif yang semakin kompleks sekaligus menjadi agen perubahan budaya yang adaptif terhadap era digital. SMKS YPK TIK Serui, sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi terakreditasi A di Kabupaten Kepulauan Yapen, berada dalam irisan antara tuntutan kemajuan teknologi dan kebutuhan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Kepemimpinan yang memiliki kemahiran budaya (*cultural proficiency*) diperlukan untuk mencegah diskriminasi dan rasisme institusional yang dapat memicu benih-benih kekerasan di lingkungan sekolah (UNESCO, 2023).

Kekerasan di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun sosial, tetap menjadi mata rantai yang sulit diputus dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Di SMK, porsi kurikulum yang didominasi oleh praktik (70%) dibandingkan teori (30%) sering kali menjadi pemicu munculnya dinamika interaksi yang keras, di mana aspek psikomotorik lebih diutamakan, sehingga potensi gesekan interpersonal menjadi lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan di SMK masih sangat memprihatinkan, dengan persentase siswa yang mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah mencapai 97%. Hal ini mencakup kekerasan fisik ringan hingga berat, serta kekerasan psikis yang dampaknya sering kali lebih destruktif terhadap perkembangan karakter siswa dalam jangka panjang (KPAI, 2024).

Penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural di SMKS YPK TIK Serui menjadi esensial karena posisi sekolah sebagai "Pusat Keunggulan" (*Center of Excellence*). Sebagai sekolah yang mengintegrasikan kurikulum berbasis dunia kerja, penguatan *soft skills*

dan karakter kebeherjaan harus berjalan selaras dengan nilai-nilai keberagaman. Kepala sekolah bukan hanya berperan sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai pemimpin instruksional yang mampu membangun komunikasi terbuka dan menerapkan kebijakan pembelajaran yang menghargai perbedaan budaya. Kepemimpinan ini diharapkan dapat menginspirasi perubahan perilaku dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk perundungan (*bullying*) dan kekerasan yang sering kali dipicu oleh prasangka, stereotip, dan diskriminasi dalam masyarakat multikultur (Mamoribo, 2026).

Secara teoretis, pendidikan multikultural bertujuan untuk menanamkan rasa empati, penghargaan, dan sikap simpati terhadap individu dengan latar belakang yang berbeda. Kekerasan sering kali muncul sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan secara tuntas dan kegagalan dalam menerima pluralitas sebagai realitas sosial. Di Papua, kearifan lokal memberikan fondasi moral yang kuat bagi kepemimpinan pendidikan untuk mengelola perbedaan melalui prinsip kesetaraan dan pengakuan untuk tujuan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ini ke dalam visi sekolah, kepala sekolah dapat menciptakan iklim organisasi yang kondusif terhadap pembentukan sikap multikultur siswa (Saputra, 2022).

Evaluasi terhadap penelitian terdahulu menunjukkan beberapa fokus kajian yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir. Penelitian di SMAN 1 Tiom menekankan pada pencegahan intoleransi melalui keteladanan personal dan komunikasi organisasi yang terbuka, namun terbatas pada konteks pegunungan yang sangat terpolarisasi (Prayitno, 2024). Studi di Jombang mengukur pengaruh kepemimpinan multikultural terhadap kurikulum inklusif, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan pada kecilnya nilai koefisien regresi yang memerlukan eksplorasi variabel kontekstual lainnya (Kustomo, 2026). Sementara itu, kajian di Sorong menyoroti strategi manajemen konflik sosial melalui sistem penyelesaian bertingkat, namun belum menyentuh dinamika spesifik pada sekolah menengah kejuruan berbasis teknologi informasi (Harsoyo, 2026).

Kesenjangan (*gap*) penelitian yang ditemukan adalah minimnya literatur yang secara khusus membahas penerapan kepemimpinan multikultural di SMK "Pusat Keunggulan" wilayah pesisir Papua. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada jenjang sekolah dasar atau sekolah umum dengan risiko kekerasan fisik yang tidak seintens di sekolah kejuruan. Selain itu, terdapat kekosongan data mengenai bagaimana pemimpin sekolah memanfaatkan literasi digital TIK sebagai instrumen penguatan kohesi sosial sekaligus mencegah perundungan siber (*cyberbullying*) di tengah masyarakat yang heterogen (Suprpto, 2024).

Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi kepemimpinan multikultural dengan kearifan lokal "Tiga Batu Satu Tungku" di institusi pendidikan vokasi teknologi. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, penelitian ini memosisikan multikulturalisme sebagai sistem operasional manajerial yang mengintegrasikan kecerdasan budaya dengan kemajuan digital di pesisir Papua. Fokus pada sinkronisasi antara nilai cinta kasih masyarakat Serui dengan strategi pencegahan kekerasan berbasis teknologi informasi menawarkan model baru kepemimpinan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap berpijak pada identitas lokal (Mamoribo, 2026).

Implementasi strategi kepemimpinan di SMKS YPK TIK Serui melibatkan pendekatan restoratif yang mengedepankan dialog daripada tindakan punitif. Kepala sekolah berperan sebagai inovator budaya yang menyelaraskan kebijakan sekolah dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini sangat krusial mengingat tekanan lingkungan eksternal di Papua, seperti pengaruh minuman keras dan

konflik horizontal, yang sering kali merembes ke dalam interaksi siswa. Kepemimpinan yang sensitif gender dan anti-diskriminasi menjadi pilar utama dalam memastikan setiap siswa merasa aman untuk mengaktualisasikan potensinya tanpa rasa takut (UNESCO, 2023).

Dampak dari kepemimpinan multikultural ini diharapkan tidak hanya menurunkan prevalensi kekerasan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikososial siswa secara menyeluruh. Dengan terciptanya harmoni antar-etnis melalui pembinaan mental dan karakter, siswa dididik untuk menjadi calon pemimpin masa depan Papua yang mampu mengelola emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan fisik. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan lembaga masyarakat adat menjadi sabuk pengaman sosial yang memperkuat efektivitas kebijakan sekolah ramah anak. Melalui model ini, sekolah bertransformasi menjadi laboratorium perdamaian yang mencetak lulusan dengan kematangan moral yang tinggi (Medlama, 2026).

Urgensi penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi hak fundamental setiap siswa Papua dalam memperoleh pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif. Kekerasan di sekolah merupakan penghambat utama partisipasi pendidikan yang jika dibiarkan akan merusak masa depan generasi emas Papua. Pendekatan kepemimpinan yang mengakar pada budaya lokal dan visioner terhadap kemajuan teknologi diharapkan dapat memutus mata rantai budaya kekerasan pelajar secara sistemik. Keberhasilan draf penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merumuskan standar kepemimpinan sekolah di wilayah multikultural (Prayitno, 2024).

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural dalam upaya membangun lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural untuk membangun sikap demokratis dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua; 2) menganalisis penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural untuk membangun paradigma keragaman dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui; 3) menganalisis penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural untuk membangun sikap anti diskriminasi dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui; 4) menganalisis penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural untuk membangun sikap sensitif gender dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui; 5) menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui; serta 6) menganalisis dampak penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural dalam pencegahan kekerasan siswa di SMKS YPK TIK Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua (Mamoribo, 2026).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditetapkan di SMKS YPK TIK Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sosiokultural di mana sekolah tersebut merupakan cerminan nyata dari heterogenitas etnis, bahasa, dan agama yang sangat kompleks di wilayah pesisir Papua, menjadikannya lokus yang tepat untuk mengeksplorasi isu kepemimpinan multikultural. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak September 2025 hingga Februari 2026, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan instrumen hingga penyusunan laporan akhir. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode

campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial eksplanatori (*explanatory sequential design*). Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan logika deduktif-objektif dengan logika induktif-subjektif guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan valid mengenai fenomena kepemimpinan dan pencegahan kekerasan. Prosedur penelitian dimulai dengan fase pertama berupa pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk memetakan tren umum, yang kemudian diikuti oleh fase kualitatif pada tahap kedua untuk memperdalam dan menjelaskan alasan di balik hasil kuantitatif tersebut secara mendalam.

Populasi penelitian mencakup seluruh siswa kelas 11 di SMKS YPK TIK Serui tahun ajaran 2025/2026 yang berjumlah 271 siswa, di mana pemilihan jenjang ini didasarkan pada kematangan adaptasi mereka di lingkungan vokasi. Penentuan sampel untuk tahap kuantitatif merujuk pada prinsip keterwakilan populasi dengan menetapkan proporsi 15%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 50 siswa untuk pengisian angket. Sementara itu, partisipan untuk tahap kualitatif dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan informan kunci seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, serta perwakilan siswa yang memiliki pengalaman langsung terkait dinamika multikultural di sekolah. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan observasi partisipatif di lingkungan sekolah. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap sertifikat akreditasi sekolah, profil institusi, rekapitulasi peristiwa kekerasan, serta SK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Seluruh data dikumpulkan dengan dukungan alat perekam digital dan kamera guna menjamin keakuratan dokumentasi proses wawancara dan interaksi sosial di lapangan.

Instrumen penelitian dikembangkan secara sistematis melalui tahapan identifikasi variabel, penjabaran dimensi, hingga perumusan butir pernyataan yang divalidasi oleh pakar (*expert judgment*). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan jalannya pengumpulan data kualitatif serta melakukan refleksi kritis terhadap temuan. Untuk menjamin mutu data kuantitatif, dilakukan uji validitas korelasi *item-total* dan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, di mana instrumen dinyatakan layak jika nilai reliabilitas melampaui ambang batas 0,70. Teknik analisis data dijalankan secara terintegrasi dengan menganalisis kedua jenis data secara terpisah sebelum dilakukan konvergensi. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif untuk menyajikan frekuensi, persentase, dan rerata yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori rentang nilai tertentu. Pada tahap kualitatif, peneliti menerapkan Analisis Tematik Refleksif (*Reflexive Thematic Analysis*) sesuai panduan Braun dan Clarke (2022) yang meliputi fase familiarisasi, pengkodean sistematis, konstruksi tema, hingga penulisan laporan naratif yang menggambarkan esensi dari pengalaman partisipan. Keabsahan data kualitatif dijamin melalui strategi kredibilitas yang mencakup triangulasi sumber dan teknik, diskusi teman sejawat untuk meminimalisir bias, serta *member check* guna memastikan hasil analisis sesuai dengan maksud informan. Integrasi data akhir dilakukan melalui pembangunan metainferensi, di mana temuan kualitatif digunakan untuk memperkuat, memperluas, atau bahkan menjelaskan kontradiksi yang muncul dari hasil statistik awal. Dengan mengombinasikan kekuatan generalisasi angka dan kedalaman narasi, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan model kepemimpinan multikultural yang aplikatif bagi pencegahan kekerasan di SMK Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan proses validasi temuan melalui perbandingan data yang diperoleh dari instrumen kuantitatif (angket), kualitatif (wawancara), serta teknik pendukung (observasi dan dokumentasi). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa simpulan penelitian memiliki derajat kepercayaan yang tinggi dan bebas dari bias subjektif peneliti.

Tabel 1. Hasil penelitian

Fokus Penelitian	Data Kuantitatif (Angket Siswa)	Data Kualitatif (Wawancara Informan)	Observasi & Studi Dokumentasi
Sikap Demokratis	Skor 58,60% (Sedang). Siswa merasa dilibatkan dalam aspirasi sekolah.	Informan (In-1, In-3) menyatakan keputusan diambil melalui rapat dewan guru dan diskusi terbuka.	Notulen rapat (DK-5) menunjukkan adanya forum dialog rutin antara pimpinan dan guru.
Paradigma Keragaman	Skor 63,20% (Sedang). Siswa setuju perbedaan adalah kekuatan sekolah.	Informan (In-6, In-7) menegaskan tidak ada pengelompokan berdasarkan etnis dalam pembagian kelas.	RPP (DK-3) memuat materi yang mengintegrasikan contoh budaya lokal Papua dan pendatang.
Anti-Diskriminasi	Skor 66,91% (Sedang). Performa tertinggi; siswa merasa diperlakukan adil.	Informan (In-2, In-4) menyatakan penanganan konflik dilakukan secara objektif tanpa melihat status sosial.	Mekanisme mediasi oleh guru BK (DK-7) menunjukkan perlakuan setara bagi semua pihak yang bertikai.
Sensitif Gender	Skor 62,80% (Sedang). Partisipasi gender dirasa cukup seimbang.	Informan (In-8, In-9) menyatakan peran ketua OSIS dan panitia diberikan secara adil kepada laki-laki/perempuan.	Dokumentasi foto (DK-2) menunjukkan keterlibatan aktif siswa perempuan dalam praktik teknis TIK.
Faktor Pendukung & Penghambat	Terdeteksi adanya pengaruh lingkungan eksternal (miras/konflik).	In-1 & In-5 menyoroti dukungan Yayasan (YPK) sebagai pendukung, namun anggaran pelatihan guru terbatas.	Anggaran sekolah (DK-1) menunjukkan alokasi minim untuk pengembangan kompetensi multikultural.
Dampak Pencegahan Kekerasan	Kekerasan fisik rendah (62,7%), namun kekerasan digital (67%) menonjol.	Informan menyatakan perkelahian fisik berkurang drastis sejak pendekatan restoratif diterapkan.	Rekapitulasi kasus (DK-6) mencatat pergeseran tren dari konflik fisik ke perundungan di media sosial.

Pembahasan

Penerapan Kepemimpinan untuk Membangun Sikap Demokratis

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan sikap demokratis kepala sekolah di SMKS YPK TIK Serui berada pada kategori sedang dengan persentase 58,60%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pimpinan telah berupaya membuka ruang partisipasi, internalisasi nilai demokrasi dalam interaksi harian belum sepenuhnya konsisten di seluruh aspek sekolah. Secara kualitatif, siswa merasa dihargai karena pimpinan memberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi konflik dari sudut pandang mereka sendiri sebelum keputusan diambil. Praktik ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mentransformasi budaya sekolah dari gaya otoriter menuju gaya partisipatif yang menghormati martabat individu (Mamoribo, 2026).

Secara teoretis, kepemimpinan demokratis dalam pendidikan multikultural bukan sekadar pengelolaan administratif, melainkan kemampuan membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati di antara semua anggota komunitas. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menciptakan suasana kerja kolaboratif dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan strategis. Di SMKS YPK TIK Serui, keterlibatan guru dalam rapat dewan guru dan transparansi komunikasi menjadi bukti operasionalisasi teori tersebut dalam manajemen pendidikan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa kepemimpinan inklusif dapat meningkatkan motivasi kolektif dalam menjaga harmoni sosial (Ifnaldi et al., 2025).

Kesenjangan (*gap analysis*) ditemukan saat membandingkan temuan ini dengan riset di SMAN 1 Tiom, di mana kepemimpinan sangat bergantung pada keteladanan personal pimpinan dalam mencegah paham eksklusivitas di wilayah pegunungan. Sementara di Serui, sebagai wilayah pesisir yang heterogen, tantangan demokrasi lebih terletak pada manajemen komunikasi lintas etnis untuk menyeimbangkan suara kelompok lokal dan pendatang. Mataputun (2022) menegaskan bahwa di Papua, pemimpin harus memiliki kecerdasan budaya untuk memahami gaya komunikasi yang berbeda dari tiap etnis agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Strategi ini terbukti mampu mereduksi benih-benih intoleransi yang sering kali muncul dalam masyarakat plural (Prayitno, 2024).

Implementasi sikap demokratis juga sejalan dengan konsep "Program Kebinekaan Global" yang menekankan pentingnya penyuluhan dan penerapan sekolah damai. Melalui dialog yang difasilitasi oleh pimpinan, siswa belajar untuk menumbuhkan sikap positif terhadap perbedaan pandangan yang muncul dalam interaksi kelas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan sekolah damai efektif dalam membentuk karakter siswa yang lebih toleran dan mampu mengelola konflik tanpa kekerasan. Keberhasilan pimpinan di Serui dalam memposisikan diri sebagai penengah, bukan hakim, mencerminkan kematangan dalam manajemen konflik berbasis demokrasi (Irianto & Albaiti, 2024).

Meskipun menunjukkan tren positif, skor 58,60% mencerminkan adanya hambatan struktural di mana beberapa keputusan masih dirasakan bersifat *top-down* oleh sebagian warga sekolah. Kepemimpinan pendidikan multikultural di Papua memang menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pemimpin berpengetahuan luas dan sensitif terhadap isu-isu keberagaman. Tanpa konsistensi dalam interaksi informal di luar jam pelajaran, nilai-nilai demokratis berisiko hanya menjadi simbol formalitas dalam dokumen administratif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial yang mengedepankan pembagian kekuasaan menjadi agenda krusial bagi pengembangan sekolah kedepannya (Vassallo, 2022).

Secara menyeluruh, penerapan sikap demokratis di SMKS YPK TIK Serui telah memberikan fondasi bagi terciptanya iklim sekolah yang aman dan partisipatif. Keberhasilan pimpinan dalam menerima kritik tanpa sikap defensif telah membangun rasa percaya (*trust*) yang kuat di kalangan siswa dan guru. Mataputun (2022) menyatakan bahwa kepemimpinan

yang menghargai martabat manusia tanpa memandang latar belakang merupakan kunci perkembangan sekolah di Papua. Melalui penguatan dialog berkelanjutan, sekolah diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya terampil TIK tetapi juga matang dalam berdemokrasi (Mataputun, 2022).

Penerapan Kepemimpinan untuk Membangun Paradigma Keragaman

Paradigma keragaman kepala sekolah di SMKS YPK TIK Serui memperoleh skor sebesar 63,20% yang berada dalam kategori sedang, menunjukkan pemahaman yang lebih kuat dibandingkan aspek demokratis. Hasil kuantitatif ini diperkuat oleh data kualitatif yang menyatakan bahwa pihak sekolah memandang perbedaan latar belakang sebagai bagian alami yang harus dikelola secara bijaksana. Kepala sekolah secara konsisten menekankan pentingnya integrasi siswa lintas etnis dalam kelompok belajar dan kegiatan organisasi guna memecah eksklusivitas kelompok. Cara pandang proaktif ini menjadi faktor kunci dalam membangun iklim sekolah yang inklusif di tengah heterogenitas etnis di Kepulauan Yapen (Mamoribo, 2026).

Penerapan paradigma keragaman ini didasarkan pada konsep bahwa keberagaman merupakan kekayaan budaya yang harus diakumulasi secara keseluruhan untuk output pendidikan yang berkarakter. Pendidikan multikultural dalam paradigma ini menuntut pemimpin sekolah untuk mengintegrasikan keragaman ke dalam kebijakan, peraturan, dan inisiatif yang mendorong budaya saling menghargai. Keberhasilan di Serui dalam menolak pelabelan kelompok tertentu membuktikan diterapkannya strategi yang berfokus pada pemahaman kehidupan yang penuh dengan perbedaan kebudayaan. Hal ini krusial untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas dalam persaingan global (Suprpto et al., 2024).

Celah penelitian terhadap kajian di Jombang menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan multikultural berpengaruh terhadap kurikulum inklusif, keberhasilannya sering kali terhambat oleh kurangnya variabel kearifan lokal. Di SMKS YPK TIK Serui, paradigma keragaman justru diperkuat melalui sinkronisasi dengan filosofi "Tiga Batu Satu Tungku" yang melibatkan sinergi antara sekolah, agama, dan adat. Mataputun (2022) berpendapat bahwa kemajemukan di Papua adalah potensi besar pembangunan jika dikelola dengan baik, namun bisa menjadi sumber konflik jika diabaikan. Inovasi penggabungan nilai adat ke dalam struktur sekolah memberikan kontribusi baru bagi manajemen pendidikan di wilayah pesisir (Kustomo et al., 2025).

Internalisasi paradigma keragaman juga diupayakan melalui program penyuluhan sekolah damai yang menanamkan nilai-nilai kebinekaan global. Siswa diajarkan untuk memahami bahwa pluralitas adalah keniscayaan yang harus disyukuri, bukan pemicu perpecahan. Irianto & Albaiti (2024) menekankan bahwa penerapan sekolah damai membantu menumbuhkan sikap positif peserta didik dalam menghadapi tantangan masyarakat multikultur. Paradigma ini membantu meminimalkan sentimen primordialisme yang sering kali menjadi akar dari perkelahian antar-pelajar di Tanah Papua (Irianto & Albaiti, 2024).

Meskipun paradigma ini sudah terbentuk dengan baik, temuan di lapangan mencatat adanya kecenderungan siswa untuk tetap berkumpul dalam kelompok homogen saat waktu istirahat. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi psikososial memerlukan proses pembiasaan yang lebih dalam melalui "ruang kontak" yang didesain secara sengaja oleh sekolah. Sekolah yang mengadopsi manajemen berbasis multikultural terbukti memiliki tingkat konflik 28% lebih rendah dibandingkan sekolah konvensional karena perbedaan diposisikan sebagai kekayaan strategis. Oleh karena itu, kegiatan lintas budaya yang berkelanjutan menjadi

mutlak diperlukan untuk meluruskan sekat-sekat primordial yang masih tersisa (Pratama, 2023).

Sebagai simpulan sub-fokus ini, pembangunan paradigma keragaman di SMKS YPK TIK Serui telah menjadi ruh utama kepemimpinan multikultural yang dijalankan. Kepala sekolah berhasil mentransformasi identitas sekolah yang beragam menjadi kekuatan kolektif untuk mencapai status "Pusat Keunggulan". Mataputun (2022) menegaskan bahwa karakter pemimpin yang mengayomi seluruh aspek sekolah adalah syarat mutlak terciptanya kualitas pendidikan yang tinggi. Konsistensi dalam menjaga visi multikultural ini akan memperkuat ketahanan sosial sekolah menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan luar (Mataputun, 2022).

Penerapan Kepemimpinan untuk Membangun Sikap Anti-Diskriminasi

Sikap anti-diskriminasi mencatat skor tertinggi sebesar 66,91%, mencerminkan performa kepemimpinan yang paling dirasakan nyata dampaknya oleh siswa di SMKS YPK TIK Serui. Data kuantitatif yang kuat ini selaras dengan pengakuan informan bahwa pimpinan sekolah menerapkan prinsip kesetaraan secara objektif tanpa melihat status ekonomi maupun latar belakang keluarga. Penanganan kasus konflik dilakukan dengan mendengarkan semua pihak secara adil, yang secara efektif menanamkan keyakinan pada siswa bahwa keadilan benar-benar ditegakkan di lingkungan sekolah. Keberhasilan ini menjadi fondasi krusial bagi terciptanya rasa aman psikologis yang mencegah munculnya dendam sosial antar-pelajar (Mamoribo, 2026).

Sikap anti-diskriminasi di sekolah ini merupakan implementasi nyata dari prinsip pendidikan yang menjamin kesederajatan hukum dan sosial bagi seluruh masyarakat multikultural. Di lingkungan SMK, di mana porsi praktik fisik sangat dominan, ketegasan pemimpin dalam menolak perlakuan berbeda menjadi perlindungan bagi siswa dari ancaman diskriminasi. Pemimpin pendidikan yang berhasil dalam konteks ini adalah mereka yang mampu mengelola lembaga dengan sensitivitas terhadap isu keberagaman dan berani mengatasi hambatan rasisme. Pengalaman nyata siswa di Serui membuktikan bahwa nilai keadilan telah diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang konsisten (Ifnaldi et al., 2025).

Analisis celah penelitian menunjukkan bahwa banyak program pencegahan kekerasan di sekolah gagal karena hanya bersifat administratif tanpa menyentuh perubahan perilaku nyata. Di SMKS YPK TIK Serui, kebijakan anti-diskriminasi didorong melalui program "Sekolah Damai" yang secara aktif menanamkan sikap positif dan menentang segala bentuk prasangka. Pendekatan ini memfokuskan pada penyuluhan rutin agar siswa memahami dampak buruk dari perilaku diskriminatif terhadap kohesi sosial. Hal ini membedakan sekolah ini dengan institusi lain yang masih mengandalkan sanksi represif yang sering kali justru melanggengkan siklus kekerasan (Irianto & Albaiti, 2024).

Selain itu, praktik anti-diskriminasi di sekolah ini terlihat dari pelibatan seluruh siswa dalam berbagai peran kepemimpinan tanpa membedakan asal-usul kedaerahan. Pembagian tugas kepanitiaan dan partisipasi dalam ajang prestasi sekolah diberikan secara merata berdasarkan kompetensi individu, bukan identitas kelompok. Mataputun (2022) menekankan bahwa kepemimpinan multikultural menuntut pimpinan untuk menjadi pelopor dalam menciptakan aturan yang adil dan menjadikannya budaya yang hidup, bukan sekadar dokumen tertulis. Keberhasilan pimpinan dalam memberikan aksesibilitas pendidikan yang setara telah menjadikan sekolah ini sebagai laboratorium perdamaian yang efektif di wilayah Papua (Mataputun, 2022).

Namun, tantangan tetap muncul pada aspek pengawasan di area-area rawan di mana prasangka halus terkadang masih muncul dalam bentuk ejekan verbal atau SARA. Kepala sekolah harus memastikan adanya pengawasan yang memadai di lokasi-lokasi strategis sekolah

untuk merespons setiap laporan perundungan dengan cepat. Peningkatan kehadiran staf di area istirahat dan pembangunan mekanisme pelaporan yang anonim sangat disarankan untuk menjaga rasa aman siswa. Konsistensi dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai perbedaan harus terus ditingkatkan agar perilaku diskriminatif tidak berkembang menjadi pola perilaku destruktif (Selian & Restya, 2024).

Secara komprehensif, sikap anti-diskriminasi telah menjadi pilar terkuat dalam model kepemimpinan di SMKS YPK TIK Serui. Keberhasilan mempertahankan skor tinggi pada indikator ini membuktikan komitmen institusional terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan vokasi. Sulianti et al. (2023) menemukan bahwa peran guru dalam menanamkan toleransi sangat didukung oleh keteladanan pimpinan yang konsisten dalam menjunjung nilai keadilan. Hasil ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan standar kepemimpinan sekolah di wilayah-wilayah multikultural lainnya di seluruh Indonesia (Sulianti et al., 2023).

Penerapan Kepemimpinan untuk Membangun Sikap Sensitif Gender

Penerapan sikap sensitif gender berada pada skor 62,80% (kategori sedang), yang mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan gender telah diupayakan namun masih menghadapi tantangan konstruksi budaya tradisional. Data kualitatif menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha keras memberikan kesempatan yang adil bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan organisasi maupun praktikum TIK. Namun, perilaku yang membedakan perlakuan terkadang masih muncul secara kasuistik akibat sisa-sisa pola pikir patriarki yang mengakar di lingkungan masyarakat sekitar. Upaya pimpinan dalam menggunakan bahasa yang netral gender dan mencegah perundungan berbasis seksualitas menjadi langkah preventif yang krusial untuk melindungi martabat seluruh siswa (Mamoribo, 2026).

Kepemimpinan pendidikan berbasis gender bertujuan untuk menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan memperkaya perspektif yang mungkin diabaikan dalam kepemimpinan tradisional. Di SMK yang identik dengan bidang teknis, stereotip bahwa laki-laki lebih "gagah dan berani" sementara perempuan lebih "lemah dan emosional" sering kali membatasi aktualisasi diri siswa perempuan. Kepala sekolah di Serui berupaya menepis mitos tersebut dengan memastikan tidak ada pembatasan peran gender dalam kepengurusan OSIS maupun proyek kolaboratif kelas. Pendekatan ini selaras dengan gerakan global untuk memastikan lingkungan sekolah aman dari segala bentuk kekerasan berbasis gender (Rahayu, 2024).

Penelitian sistematis menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender (GBV) di institusi pendidikan merupakan masalah serius yang dipicu oleh norma gender yang kaku dan unequal power relations. Kepala sekolah di SMKS YPK TIK Serui telah mulai merancang mekanisme pencegahan dengan menekankan sikap hati-hati dalam menangani persoalan antar siswa laki-laki dan perempuan. Pembangunan "Sekolah Damai" yang inklusif gender menjadi strategi kunci untuk menciptakan ruang aman di mana setiap individu merasa dihargai martabatnya. Sinergi antara kebijakan sekolah dan pembentukan karakter yang menghargai identitas gender sangat dibutuhkan untuk menekan angka pelecehan (Together for Girls, 2026).

Selain itu, sensitivitas gender di sekolah ini diwujudkan melalui pengawasan ketat agar tidak terjadi pelecehan atau candaan yang merendahkan martabat gender tertentu. Guru-guru diarahkan untuk memberikan bimbingan yang bersifat sabar, dialogis, dan memahami latar belakang sosiopsikologis siswa. Mataputun (2022) berpendapat bahwa kepemimpinan multikultural harus siap menerima perbedaan latar belakang termasuk aspek gender untuk mendorong perkembangan sekolah yang lebih dinamis. Keberhasilan menciptakan suasana belajar yang suportif telah meningkatkan rasa percaya diri siswa perempuan untuk mendalami bidang teknologi informasi (Mataputun, 2022).

Meskipun menunjukkan arah positif, skor 62,80% menunjukkan perlunya penguatan kapasitas edukator melalui pelatihan spesifik mengenai kebinekaan global dan sensitivitas gender. Program Kebinekaan Global oleh Irianto & Albaiti (2024) menawarkan kerangka kerja bagi sekolah untuk menumbuhkan sikap positif melalui penyuluhan yang sistematis tentang kesetaraan. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, guru berisiko terjebak pada pemahaman gender yang dangkal yang justru melanggengkan stereotip di dalam kelas. Sinergi antara pimpinan sekolah dan orang tua juga penting untuk menyelaraskan pemahaman mengenai hak-hak gender antara lingkungan rumah dan sekolah (Irianto & Albaiti, 2024).

Secara menyeluruh, sensitivitas gender dalam kepemimpinan di SMKS YPK TIK Serui merupakan bagian integral dari transformasi menuju sekolah inklusif. Keberhasilan meminimalisir sekat-sekat gender dalam pendidikan vokasi teknologi merupakan capaian membanggakan bagi institusi di wilayah Papua. Yosep et al. (2023) menyoroti bahwa intervensi berbasis sekolah yang efektif harus menyertakan penguatan kapasitas staf dalam menangani isu-isu gender secara komprehensif. Penguatan kebijakan internal yang berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan kelompok rentan menjadi fondasi bagi kemajuan sekolah di masa depan (Yosep et al., 2023).

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Kepemimpinan

Analisis terhadap faktor determinan menunjukkan bahwa dukungan strategis dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan status sekolah sebagai "Pusat Keunggulan" menjadi faktor pendukung internal yang paling signifikan. Sinergi antara pimpinan sekolah dengan tokoh masyarakat dan orang tua melalui filosofi "Tiga Batu Satu Tungku" memberikan perlindungan sosial bagi setiap kebijakan sekolah. Kesadaran diri staf pengajar untuk beradaptasi dengan kurikulum merdeka dan kemauan belajar tentang manajemen multikultural juga memperkuat efektivitas pencegahan kekerasan. Adanya fasilitas TIK yang memadai turut mempermudah pimpinan dalam membangun sistem informasi manajemen yang transparan (Mamoribo, 2026).

Namun, hambatan anggaran pelatihan bagi guru mengenai manajemen konflik berbasis multikultural menjadi kendala utama yang teridentifikasi. Banyak tenaga pendidik yang masih mengandalkan pengalaman pribadi daripada dasar teoretis yang kuat dalam menyelesaikan gesekan antar-etnis di kelas. Faktor penghambat ini sejalan dengan temuan Gorski (2012) bahwa kurangnya dukungan struktural dan anggaran sering kali menghambat optimalisasi peran kepemimpinan yang inklusif. Tanpa alokasi dana khusus untuk pengembangan profesional, efektivitas intervensi pencegahan kekerasan berisiko mengalami stagnasi akibat kelelahan manajerial staf (Gorski, 2012).

Faktor eksternal sosiokultural Papua, seperti pengaruh minuman keras dan fluktuasi stabilitas keamanan di wilayah pesisir, turut memberikan tekanan bagi stabilitas sekolah. Isu-isu sensitif terkait konflik politik atau keret (marga) yang terjadi di luar gerbang sekolah sering kali merembes ke dalam interaksi siswa, menciptakan ketegangan situasional. Mataputun (2022) mengingatkan bahwa kuatnya pengaruh konflik masa lalu di Papua menuntut kepala sekolah untuk memiliki strategi manajemen konflik yang sangat hati-hati dan bijaksana. Penanganan terhadap hambatan eksternal ini menuntut diplomasi yang baik dengan aparat keamanan dan lembaga adat setempat (Mataputun, 2022).

Selain itu, rendahnya pemahaman teoretis sebagian guru mengenai esensi multikulturalisme mengakibatkan adanya resistensi terhadap perubahan gaya kepemimpinan. Implementasi program sekolah damai sering kali terbentur pada paradigma lama staf senior yang masih menganggap hukuman fisik sebagai metode disiplin yang paling efektif. Program Kebinekaan Global menyarankan perlunya penyuluhan intensif untuk menyamakan persepsi

staf tentang pentingnya iklim sekolah yang ramah anak. Kesenjangan pemahaman ini menciptakan tantangan dalam konsistensi penegakan aturan anti-kekerasan di lingkungan sekolah (Irianto & Albaiti, 2024).

Keberhasilan mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat bergantung pada kepemimpinan yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada konteks budaya lokal. Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pelaporan perundungan yang anonim menjadi salah satu inovasi solusi untuk mengatasi rasa takut siswa dalam melapor. Mudgal et al. (2026) menekankan bahwa efektivitas intervensi sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan kuantitatif data dan pemaknaan kualitatif atas masalah di lapangan. Melalui pemetaan risiko yang akurat, pimpinan sekolah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya yang terbatas untuk menangani titik rawan (Mudgal et al., 2026).

Sintesis terhadap faktor pendukung dan penghambat menegaskan bahwa kepemimpinan multikultural beroperasi dalam ekosistem yang sangat kompleks di Papua. Keberhasilan model ini di Serui memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya ketahanan organisasi melalui dukungan pemangku kepentingan eksternal. Medlama (2026) mendorong perlunya pembinaan mental sebagai upaya utama untuk mencegah tawuran pelajar, yang harus didukung oleh peran aktif orang tua. Dengan memperkuat faktor pendukung dan memitigasi hambatan secara sistemik, sekolah dapat terus mempertahankan perannya sebagai institusi pembentuk warga negara yang damai (Medlama, 2026).

Dampak Penerapan Kepemimpinan dalam Pencegahan Kekerasan

Penerapan kepemimpinan berwawasan multikultural di SMKS YPK TIK Serui telah memberikan dampak signifikan berupa penurunan prevalensi kekerasan fisik, yang kini berada pada skor 62,7% (kategori sedang). Pengalihan strategi dari tindakan punitif menuju pendekatan restoratif telah menciptakan iklim sekolah yang lebih tenang, di mana siswa merasa dihargai sebagai individu utuh. Keberhasilan pimpinan dalam membangun komunikasi terbuka telah meminimalisir dorongan agresi siswa yang biasanya dipicu oleh rasa frustrasi atau ketidakadilan. Dampak positif ini membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional mampu menjadi agen perubahan budaya yang efektif (Mamoribo, 2026).

Namun, penelitian ini mengungkap adanya pergeseran pola kekerasan dari ranah fisik menuju ranah verbal (66,5%) dan kekerasan digital (67%). Tingginya angka kekerasan digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membawa risiko baru berupa perundungan siber yang sering kali menormalkan ejekan di media sosial sebagai "bercanda". UNESCO (2023) memperingatkan bahwa kemahiran budaya diperlukan untuk memastikan penggunaan perangkat digital tidak memperlebar jurang segregasi sosial di dalam kelas. Kepala sekolah dituntut untuk segera merancang kurikulum literasi digital multikultural guna memastikan teknologi menjadi alat penguat kohesi sosial (UNESCO, 2023).

Dampak sosial dari model kepemimpinan ini terlihat dari meningkatnya solidaritas antar-etnis melalui kegiatan kolaboratif lintas identitas, seperti festival budaya rutin. Siswa dari berbagai suku kini lebih berani berinteraksi dan saling menghargai praktik keagamaan masing-masing, yang melahirkan kematangan emosional peserta didik. Irianto & Albaiti (2024) menegaskan bahwa penerapan program sekolah damai memberikan hasil nyata berupa tumbuhnya sikap positif dan kemampuan penyelesaian konflik secara damai. Karakter lulusan yang toleran diharapkan akan menjadi agen perdamaian saat mereka memasuki dunia kerja yang global di masa depan (Irianto & Albaiti, 2024).

Secara manajerial, kepemimpinan multikultural telah meningkatkan motivasi kerja guru yang merasa didukung dalam mendidik kelas yang heterogen secara budaya. Iklim organisasi yang harmonis memberikan ruang bagi inovasi pedagogi responsif budaya yang meningkatkan

kualitas pembelajaran siswa secara keseluruhan. Mataputun (2022) menyimpulkan bahwa luaran pendidikan dari kepemimpinan multikultural adalah siswa yang memiliki pengetahuan luas dan karakter kuat yang menghargai latar belakang keberagaman. Sinergi ini menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam menghadapi potensi konflik horizontal di Tanah Papua (Mataputun, 2022).

Terlepas dari capaian tersebut, tingginya kekerasan digital (67%) menuntut pimpinan untuk segera menerapkan sistem monitoring daring yang lebih proaktif dan aman bagi siswa. Kekerasan siber memiliki dampak psikologis yang merusak konsentrasi belajar dan dapat memicu trauma berkepanjangan jika tidak ditangani dengan strategi mitigasi yang tepat. Puspitarini et al. (2024) menemukan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam program Sekolah Ramah Anak (SRA) mampu memperkuat disiplin positif dan menurunkan angka viktimisasi. Keberhasilan menekan agresi fisik harus diikuti dengan keberanian pimpinan untuk menegakkan aturan yang tegas terhadap perundungan digital (Puspitarini et al., 2024; Bukhori et al., 2025; Laili & Hidayah, 2025; Mumthaza et al., 2026; Saleh et al., 2025).

Kesimpulan dari dampak implementasi ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural mampu menyelamatkan masa depan generasi emas Papua. Meskipun berbagai bentuk kekerasan dalam kategori sedang masih ditemukan, polanya kini lebih terkontrol melalui mekanisme dialog dan mediasi yang humanis. Prayitno (2024) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan yang memimpin dengan visi multikultural akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan relevan. Melalui komitmen berkelanjutan, SMKS YPK TIK Serui dapat terus menjadi mercusuar pendidikan vokasi yang aman dan damai di Papua (Prayitno, 2024; Fuaddah et al., 2024; Ifnaldi et al., 2025; Islakh et al., 2025; Istianah et al., 2024; Rais, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural di SMKS YPK TIK Serui secara keseluruhan terbukti efektif dalam memitigasi risiko kekerasan siswa melalui pendekatan yang inklusif dan humanis. Berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif, seluruh indikator kepemimpinan multikultural berada pada kategori sedang dengan rentang skor antara 58,60% hingga 66,91%. Keberhasilan tertinggi ditemukan pada aspek anti-diskriminasi (66,91%), di mana pimpinan berhasil menanamkan rasa percaya siswa terhadap keadilan institusi melalui penanganan konflik yang objektif dan transparan. Implementasi paradigma keragaman (63,20%) juga berjalan baik melalui integrasi kearifan lokal "Tiga Batu Satu Tungku" yang mensinergikan peran sekolah, agama, dan adat. Meskipun sikap demokratis (58,60%) dan sensitivitas gender (62,80%) sudah menunjukkan arah positif, tantangan berupa konsistensi interaksi harian dan sisa-sisa konstruksi budaya patriarki masih memerlukan perhatian lebih lanjut guna menciptakan kesetaraan yang menyeluruh.

Dampak nyata dari model kepemimpinan ini adalah terjadinya pergeseran pola kekerasan di lingkungan sekolah, dari bentuk fisik yang destruktif menuju bentuk non-fisik yang lebih halus. Prevalensi kekerasan fisik tercatat pada angka 62,7% (kategori sedang), namun tantangan baru muncul dari tingginya angka kekerasan digital (67%) dan kekerasan verbal (66,5%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun strategi pimpinan berhasil meredam agresi fisik melalui pendekatan restoratif dan dialogis, adaptasi terhadap era digital memerlukan penguatan literasi multikultural yang lebih intensif bagi seluruh warga sekolah. Efektivitas pencegahan kekerasan ini didukung secara kuat oleh komitmen internal pimpinan serta dukungan strategis dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan status sekolah sebagai Pusat Keunggulan. Namun, hambatan utama berupa keterbatasan anggaran untuk pelatihan

guru dan pengaruh eksternal seperti peredaran minuman keras serta fluktuasi stabilitas keamanan di wilayah Papua tetap menjadi ancaman situasional yang menuntut mitigasi berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan adanya alokasi sumber daya yang lebih spesifik untuk pengembangan kompetensi sosiokultural guru agar tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi dalam penyelesaian konflik. Integrasi nilai-nilai perdamaian ke dalam kurikulum berbasis teknologi informasi harus diperluas untuk mencakup etika komunikasi digital guna menekan angka *cyberbullying*. Sinergi trilateral antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adat perlu diformalkan dalam kebijakan proteksi siswa yang komprehensif. Melalui penguatan kepemimpinan yang adaptif dan berakar pada nilai cinta kasih masyarakat pesisir Papua, SMKS YPK TIK Serui dapat terus menjadi model transformasi pendidikan vokasi yang aman, demokratis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.45678>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>
- Bukhori, N., Islamiyah, A., Nazifa, S. I., & Kurnia, R. (2025). Peran orang tua, guru dan manajemen sekolah dalam mencegah perilaku bullying. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1810–1818. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10839>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Daulay, I., Hidayat, R., & Harahap, S. M. (2025). Pendidikan multikultural untuk mencegah bullying etnosentrisme di pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1065>
- de Vicente Abad, A. (2023). Restorative practices in educational settings: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8, 1520137. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1520137>
- Fuaddah, D., Ambarwati, R., Afidah, M., Rusiana, K. N., Jati, T. I. J. I., & Fathoni, T. (2024). Kepemimpinan inklusif kepala sekolah dalam menjaga kerukunan dan moderasi beragama di sekolah. *Social Science Academic*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.6299>
- Gorski, P. C. (2012). Instructional leadership for equity and social justice. *Journal of School Leadership*, 22(1). <https://doi.org/10.1177/105268461202200101>
- Handyani, N. N. L. (2021). Pengaruh model pembelajaran resolusi konflik terhadap prestasi belajar IPS dengan kovariabel sikap multikultur. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 10(2), 111–123. <https://doi.org/10.33751/qalam.v10i2.3456>
- Harsoyo, R. (2026). Teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dan aplikasinya dalam peningkatan mutu pendidikan multikultural di Sorong. *Jurnal Kependidikan Islam*, 16(1), 15–28. <https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JKPI/article/view/5110>
- Hasfiana, Syarifuddin Ondeng, & Rahman, U. (2026). Population and sample as methodological basis in educational research. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v3i1.145>
- Hayati, S., Mubin, N., & Gumohung, A. (2023). Implementasi pendidikan multikultural dalam menghadapi globalisasi di era modern. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 23–32. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i2.6548>

- Ifnaldi, I., Sartika, D., & Hadijaya, Y. (2025). Kepemimpinan dalam pendidikan multikultural. *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 8(1), 91–106. <https://doi.org/10.52166/talim.v8i1.8787>
- Irianto, P., & Albaiti, A. (2024). Program Kebinekaan Global: Penyuluhan dan penerapan sekolah damai untuk menumbuhkan sikap positif peserta didik. *Jurnal Abdi Pendidikan*, 5(1), 29–39. <https://doi.org/10.33330/jabdi.v5i1.9999>
- Islakh, A. N., Pujianto, P., & Adibah, I. Z. (2025). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 982–992. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.6440>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriasari, S. (2024). Peran pendidikan kebinekaan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10192>
- Khabibullah, M., Alimin, & Sholahuddin, G. M. I. (2024). Tahapan dan langkah-langkah penerapan mixed method research (MMR) dalam penelitian pendidikan. *Qomaruna: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1), 69–86. <https://doi.org/10.62048/qjms.v2i1.55>
- KPAI. (2024). *Laporan prevalensi dan bentuk kekerasan pada satuan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi>
- Kristiyanto, D., & Dhewantoro, H. N. S. (2026). Menjembatani keberagaman: Peran demokrasi dalam mewujudkan multikulturalisme di Indonesia. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(2), 55-62. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/491>
- Kustomo, Firman, & Prianto, A. (2025). Pengaruh kepemimpinan multikultural kepala sekolah terhadap implementasi kurikulum inklusif di sekolah dasar. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 597–606. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5303>
- Laili, A., & Hidayah, N. (2025). Strategi pendidikan karakter sebagai upaya preventif dan kuratif untuk mencegah bullying terhadap anak usia dini. *YASIN*, 5(5), 5089–5104. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7259>
- Mamoribo, V. D. A. (2026). *Laporan internal kepemimpinan multikultural dan evaluasi sekolah ramah anak SMKS YPK TIK Serui*. SMKS YPK TIK Serui. <https://smksyptikserui.sch.id/>
- Mataputun, Y. (2022). *Kepemimpinan multikultural di sekolah: Teori dan praktik dalam konteks Papua*. UNCEN Press.
- Medlama, M. (2026, February 3). Dinas Pendidikan Papua dorong pembinaan mental cegah tawuran pelajar. *RRI News Jayapura*. <https://rri.co.id/jayapura/regional/2155019/>
- Mudgal, S. K., Sharma, S. K., Gaur, R., et al. (2026). Sample size estimation in mixed methods research: Balancing quantitative power and qualitative saturation. *Journal of Medical Evidence*, 7, e000036. <https://doi.org/10.1136/jmev-2026-000036>
- Mumthaza, S., Cholily, Y. M., Pantiwati, Y., & Rahardjanto, A. (2026). Character strengthening strategies for Indonesian students in the digital era: Literature review. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.24042/tadris.v11i1.29618>

- Munawwarah, F., Sa'diyah, H., Timamah, I., & Jannah, F. (2025). Essential components of quantitative research: A guide for beginner researchers. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i1.63>
- Nur Rahayu, R. (2024). Manajemen kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik. *Jurnal Elemen*, 10(2), 423-428. <https://doi.org/10.23887/jear.v8i2.67089>
- Pratama, R. (2023). Multicultural education management strategies to promote tolerance and diversity in the school environment. *Journal of Educational Management*, 12(1), 45–56. <https://www.researchgate.net/publication/399524067>
- Prayitno. (2024). Kepemimpinan kepala sekolah berwawasan multikultural dalam pencegahan intoleransi: Studi kasus SMAN 1 Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.30605/jsgp.v7i1.8256>
- Prayoga, D. A. (2024). *Implementasi gaya kepemimpinan demokratis di lembaga swadaya masyarakat (Periode 2021-2025)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70277/>
- Rais, R. (2025). Multicultural education management strategies to promote tolerance and diversity in the school environment. *Gestion Educativa Journal*, 2(2), 9–17. <https://doi.org/10.62872/wch9k693>
- Saleh, M. N. I., Hanum, F., & Rukiyati. (2025). Stakeholders' perspectives on whole-school approaches to prevent and address bullying and cyberbullying in Indonesian high schools. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102336. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102336>
- Saputra, A. D. (2022). *Integrasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural di Tanah Papua (Studi kasus di Sekolah Dasar Inpres 1 Arso 2 Kabupaten Keerom)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40363/>
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran kepala sekolah dalam mengatasi bullying di sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.751>
- Sinaga, N. S., Aprilinda, D., & Budiman, A. P. (2021). Konsep kepemimpinan transformasional. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 840–846. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i7.123>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sulianti, N. M., Kasdiyanto, D. Y., & Febriyanto. (2023). Peran guru dalam menanamkan sikap toleransi siswa melalui pembelajaran PKn di MTS Raudlatul Hasaniyah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 1(2), 23–32. <https://doi.org/10.51878/educational.v6i2.10066>
- Suprpto, R. I. T., Hariyati, N., Dewi, U., Khamidi, A., & Amalia, K. (2024). Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap pendidikan multikultural. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 1940–1953. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3334>
- Susantyo, B. (2024). Faktor-faktor penyebab perilaku agresi pada budaya perang suku masyarakat tradisional di Papua. *Jurnal Diversita*, 7(1), 121-132. <https://doi.org/10.31289/diversita.v7i1.4856>

- Together for Girls. (2026). *School-related gender-based violence: Achieving systemic, sustainable change with youth*. Rise Up Policy Brief. <https://www.togetherforgirls.org/en/resources/srgbv-2026>
- Toyon, M. A. S. (2021). Explanatory sequential design of mixed methods research: Phases and challenges. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 253-260. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1262>
- UNESCO. (2023). *Cultural proficiency and digital education: Bridging social gaps in multicultural classrooms*. UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000038>
- Vassallo, B. (2022). Multicultural education leadership: A qualitative study on school leadership praxis in Malta. *The Online Journal of New Horizons in Education*, 12(4), 31–47. <https://tojned.net/journals/tojned/articles/v12i04/v12i04-04.pdf>
- Yosep, I., Hikmat, R., & Mardhiyah, A. (2023). School-based nursing interventions for preventing bullying and reducing its incidence on students: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1577. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021577>